

GASTRODIPOMASI UNTUK PERTAHANAN WARISAN BUDAYA KAWASAN SYAM (PALESTINA)

Dewi Rafani

Baik Berisik

Sri Vania Rahman

Baik Berisik

Muhammad Rofid Munif

Baik Berisik

e-mail: srivaniarahman@gmail.com

ABSTRACT

Culinary are an important part of a nation's cultural identity. In the Levant (Sham), particularly Palestine, traditional dishes such as Hummus, Falafel, and Kunafah are not only cultural heritage but also symbols of resistance against Israel's unilateral claims to occupation of Palestinian land since 1948. This Israeli culinary claim reflects an attempt at cultural appropriation that has eroded Palestine's presence in the eyes of the world. In this context, gastrodiplomacy has emerged as a soft power instrument used by Palestine to maintain and promote its cultural identity internationally. This study aims to understand why Palestine champions culinary arts as part of its national identity and to analyze the gastrodiplomacy strategies implemented by the government, society, and the Palestinian diaspora in various countries. Using descriptive-analytical methods and a historical approach, this study utilizes data from interviews, literature studies, and online sources. The results show that culinary arts serve not only as a means of cultural diplomacy but also as a political tool to strengthen Palestine's legitimacy amidst prolonged colonialism and occupation. Gastrodiplomacy efforts demonstrate that, despite being under colonial rule, Palestine remains able to assert its existence and champion its national interests through its culinary heritage.

Keywords: *Palestine, culinary, gastrodiplomacy, cultural identity.*

ABSTRAK

Kuliner merupakan bagian penting dari identitas budaya suatu bangsa. Di kawasan Syam, khususnya Palestina, kuliner tradisional seperti Hummus, Falafel, dan Kunafah tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga simbol perlawanan terhadap klaim sepihak Israel yang sejak 1948 melakukan penjajahan di tanah Palestina. Klaim kuliner oleh Israel ini mencerminkan upaya apropriasi budaya yang mengikis eksistensi Palestina di mata dunia. Dalam konteks tersebut, gastrodiplomasi muncul sebagai instrumen *soft power* yang digunakan Palestina untuk mempertahankan dan mempromosikan identitas budayanya di kancah internasional. Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan Palestina memperjuangkan kuliner sebagai bagian dari identitas nasional serta menganalisis strategi gastrodiplomasi yang dijalankan, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun diaspora Palestina di berbagai negara. Dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan historis, penelitian ini menggunakan data dari wawancara, studi pustaka, serta sumber daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuliner tidak hanya berfungsi sebagai sarana diplomasi budaya, tetapi juga sebagai alat politik

untuk memperkuat legitimasi Palestina di tengah penjajahan dan pendudukan berkepanjangan. Upaya gastrodiplomasi membuktikan bahwa meski berada dalam situasi penjajahan, Palestina tetap mampu menegaskan eksistensi dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui warisan kuliner.

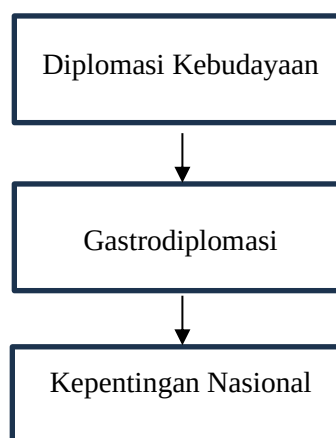
Kata kunci: Palestina, kuliner, gastrodiplomasi, identitas budaya.

1. PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Pendudukan Israel atas Palestina sejak tahun 1948 tidak hanya berdampak pada aspek politik dan kemanusiaan, tetapi juga pada upaya sistematis menghapus identitas budaya Palestina melalui klaim sepihak terhadap warisan budaya, termasuk kuliner tradisional seperti Hummus, Falafel, dan Kunafah (White, 2017). Klaim tersebut merupakan bentuk apropriasi budaya yang bertujuan membangun legitimasi historis Israel di tanah yang sebelumnya dihuni oleh bangsa Palestina (Shomali, 2004). Dalam konteks ini, kuliner tidak sekadar kebutuhan konsumsi, tetapi juga simbol identitas, perlawanan, dan alat diplomasi budaya.

Sebagai bagian dari soft power, gastrodiplomasi menjadi strategi penting Palestina untuk mempertahankan eksistensi budaya dan memperkuat pengakuan internasional di tengah keterbatasan politik (Nye, 2004). Melalui diplomasi kuliner, Palestina berupaya menegaskan keaslian warisan budayanya sekaligus menumbuhkan empati global terhadap perjuangan mereka. Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat sipil dan diaspora Palestina, seperti terlihat pada partisipasi mereka dalam ajang Dubai Expo 2020 yang menampilkan kuliner dan sejarah Palestina sebagai bentuk diplomasi budaya (Ghani, 2021).

Selain itu, keanggotaan Palestina dalam UNESCO memperkuat posisi hukumnya dalam melindungi warisan budaya tak benda, termasuk kuliner, sebagai bagian dari strategi memperjuangkan kedaulatan nasional (Syuib, 2020). Melalui gastrodiplomasi, Palestina menunjukkan bahwa identitas bangsa dapat dipertahankan tanpa kekerasan, melainkan melalui kekuatan budaya dan narasi publik global. Dengan demikian, penelitian ini menelaah bagaimana gastrodiplomasi digunakan Palestina sebagai sarana mempertahankan warisan kuliner serta memperjuangkan identitas nasional di tengah hegemoni budaya dan politik Israel. Diagram dibawah ini menggambarkan alur pemikiran dalam penelitian ini.



Dari berbagai literatur, kajian gastrodiplomasi Palestina masih relatif terbatas dibandingkan diplomasi budaya pada umumnya. Sebagian besar penelitian berfokus pada isu politik dan kemanusiaan, sementara aspek kuliner sebagai strategi soft power masih jarang dieksplorasi secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana Palestina menggunakan gastrodiplomasi sebagai alat pertahanan budaya dan identitas nasional di tengah hegemoni politik dan apropriasi budaya Israel.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian mengenai diplomasi budaya dan kuliner dalam konteks Palestina telah menjadi fokus berbagai kajian akademik, terutama sejak meningkatnya kesadaran global terhadap praktik apropriasi budaya oleh Israel. Kajian literatur ini menguraikan temuan-temuan penelitian terdahulu dan landasan teoritis yang menjadi dasar penelitian, meliputi konsep kebudayaan, warisan budaya, gastronomi, diplomasi budaya, gastrodiplomasi, serta kepentingan nasional.

2.1. Penelitian Terdahulu

Berbagai studi menyoroti pentingnya diplomasi budaya sebagai instrumen politik luar negeri yang efektif bagi negara-negara yang menghadapi keterbatasan kekuatan militer maupun ekonomi. Utami (2018) menjelaskan bahwa kuliner merupakan bagian dari identitas budaya yang dapat menjadi media komunikasi antarbangsa. Kurniawan (2017) menunjukkan bagaimana bentuk soft diplomacy seperti kampanye dan boikot produk Israel digunakan oleh masyarakat Irlandia untuk mengekspresikan solidaritas terhadap Palestina. Sementara itu, White (2017) dan Shomali (2004) menegaskan bahwa Israel melakukan strategi apropriasi budaya yang bertujuan menghapus eksistensi Palestina dari sejarah dan kebudayaan Timur Tengah.

Penelitian lain menyoroti pentingnya lembaga internasional dalam melindungi warisan budaya negara terjajah. Syuib (2020) menjelaskan bahwa dengan bergabungnya Palestina ke UNESCO, negara tersebut dapat memperkuat klaim terhadap warisan budayanya di ranah internasional. Studi Davis (2001) menambahkan bahwa budaya dan produk turun-temurun seperti kuliner memiliki peran penting dalam menjaga memori kolektif masyarakat Palestina, terutama di tengah situasi penjajahan dan diaspora.

2.2. Kebudayaan dan Warisan Budaya

Kebudayaan secara umum dapat dipahami sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, 2009). Dalam konteks politik internasional, kebudayaan juga berfungsi sebagai alat diplomasi untuk memengaruhi persepsi publik global. Sementara itu, warisan budaya mencakup baik aspek berwujud (tangible heritage) seperti situs dan artefak, maupun tidak berwujud (intangible heritage) seperti bahasa, tradisi, dan kuliner (UNESCO, 2003). Bagi Palestina, kuliner tradisional seperti Hummus, Falafel, dan Kunafah merupakan warisan budaya tak benda yang memiliki nilai simbolik tinggi dalam mempertahankan identitas nasional (Steph, n.d.).

2.3. Gastronomi sebagai Identitas Budaya

Gastronomi tidak hanya berkaitan dengan teknik memasak, tetapi juga berhubungan dengan cara suatu bangsa mengekspresikan dirinya melalui makanan (Santich, 2004). Dalam konteks Palestina, makanan berfungsi sebagai simbol kontinuitas dan perlawanan terhadap kolonialisme budaya (Shomali, 2002). Kuliner menjadi media naratif yang menyampaikan sejarah, nilai, dan identitas bangsa yang tertindas. Makanan seperti Hummus dan Kunafah misalnya, memiliki makna sosial dan religius yang kuat serta berfungsi sebagai penanda kolektif bangsa Palestina di tengah globalisasi (Utami, 2018).

2.4. Diplomasi Budaya dan Gastrodiplomasi

Diplomasi budaya merupakan strategi negara dalam menggunakan elemen budaya untuk mencapai tujuan politik luar negeri dan membentuk citra positif di mata dunia (Mark, 2010). Melalui diplomasi budaya, negara dapat memperkuat soft power—kekuatan yang tidak bersifat koersif tetapi memikat melalui nilai, budaya, dan kebijakan luar negeri yang menarik (Nye, 2004). Gastrodiplomasi, sebagai bentuk khusus dari diplomasi budaya, menggunakan makanan sebagai medium diplomatik untuk memperkenalkan identitas nasional dan meningkatkan pemahaman lintas budaya (Rockower, 2012).

Palestina memanfaatkan gastrodiplomasi untuk mengontraskan narasi budaya yang dibangun Israel. Salah satu contohnya adalah partisipasi Palestina dalam Dubai Expo 2020, di mana kuliner menjadi alat diplomasi untuk memperkenalkan sejarah dan warisan budaya kepada dunia (Ghani, 2021). Selain pemerintah, masyarakat sipil dan diaspora juga memainkan peran penting dalam mempromosikan kuliner Palestina melalui festival budaya, bisnis restoran, serta publikasi buku resep internasional. Upaya ini memperlihatkan bahwa gastrodiplomasi tidak hanya dijalankan oleh negara, tetapi juga oleh aktor non-negara yang memiliki kepentingan budaya dan politik serupa (Wilson, 2011).

2.5. Kepentingan Nasional dan Identitas

Kepentingan nasional menjadi dasar utama dari segala bentuk diplomasi, termasuk diplomasi budaya. Menurut Morgenthau (1948), kepentingan nasional mencakup upaya mempertahankan eksistensi, keamanan, dan pengaruh negara di lingkungan internasional. Dalam konteks Palestina, mempertahankan identitas budaya merupakan bagian dari perjuangan politik untuk memperoleh pengakuan sebagai negara berdaulat. Hal ini sejalan dengan teori deklaratif negara dalam Konvensi Montevideo (Crawford, 1976), di mana kemampuan menjalin hubungan internasional menjadi salah satu indikator kedaulatan. Melalui diplomasi budaya dan gastrodiplomasi, Palestina membangun narasi eksistensi dan menegaskan kehadirannya di kancah global.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan dukungan metode historis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada makna sosial,

nilai budaya, dan representasi identitas yang melekat pada kuliner Palestina sebagai bentuk *soft power* melalui gastrodiplomasi (Creswell, 2014). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali fenomena secara mendalam berdasarkan konteks sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi upaya Palestina dalam mempertahankan warisan kulinernya dari klaim sepihak Israel.

Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta, hubungan antarfenomena, serta dinamika diplomasi budaya yang terjadi saat ini (Nazir, 1988). Sedangkan metode historis diterapkan untuk menelusuri asal-usul, perkembangan, dan perubahan makna kuliner Palestina seperti *Hummus*, *Falafel*, dan *Kunafah* dalam konteks penjajahan dan apropriasi budaya (Lange, 2013). Dengan demikian, kombinasi kedua metode ini memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap aspek historis sekaligus aktual dari fenomena yang dikaji.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini meliputi tiga kuliner khas Palestina yang sering menjadi sasaran klaim budaya oleh Israel, yaitu *Hummus*, *Falafel*, dan *Kunafah*. Ketiganya merupakan simbol identitas budaya Palestina dan memiliki nilai sosial, ekonomi, serta politis dalam membentuk citra nasional. *Hummus* adalah hidangan tradisional berbahan dasar kacang Arab yang umum disajikan dalam sarapan dan perayaan keagamaan (Safa.ps, 2022). *Falafel* merupakan makanan jalanan populer yang menggambarkan kesederhanaan sekaligus kebersamaan masyarakat Palestina (Tariq, 2021). Sedangkan *Kunafah* adalah hidangan penutup dari Nablus yang menjadi ikon kuliner Palestina dan sering diklaim sebagai milik Israel dalam media internasional (Arti, 2018).

Ketiga kuliner ini dipilih karena mencerminkan representasi identitas nasional Palestina yang dilestarikan baik di tanah air maupun oleh diaspora. Selain itu, keberadaannya diakui secara luas sebagai simbol perjuangan budaya di tengah penjajahan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: studi pustaka, wawancara mendalam, dan penelusuran berbasis internet.

1. **Studi pustaka** dilakukan dengan menelaah literatur akademik, laporan organisasi internasional, media daring, serta karya ilmiah yang relevan dengan tema gastrodiplomasi dan diplomasi budaya Palestina (Syaibani, 2012).
2. **Wawancara mendalam** dilakukan terhadap dua informan diaspora Palestina: Emad Al Amad, pemilik restoran *Emados Shawarma* di Indonesia, dan Laila El Haddad, jurnalis Palestina di Amerika Serikat. Keduanya dipilih karena keterlibatannya dalam praktik diplomasi budaya dan promosi kuliner Palestina secara internasional. Wawancara dilakukan secara langsung dan daring untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pengalaman, strategi, dan persepsi mereka terhadap gastrodiplomasi Palestina (Tanzeh, 2011).
3. **Penelitian berbasis internet** digunakan untuk menelusuri sumber-sumber digital, seperti artikel berita, situs resmi pemerintah, publikasi diaspora, dan media sosial

yang mendokumentasikan praktik promosi kuliner Palestina (R. Saskia, 2021).

Pendekatan triangulasi data digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas informasi yang diperoleh dari ketiga sumber tersebut.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui enam tahapan sebagaimana diuraikan oleh Creswell (2014):

1. **Pengumpulan dan pengorganisasian data** dari berbagai sumber tertulis, wawancara, dan dokumentasi.
2. **Pembacaan dan penulisan ulang** untuk mengidentifikasi tema utama dan pola makna.
3. **Analisis mendalam** dengan menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian.
4. **Deskripsi dan kategorisasi data** ke dalam tema-tema seperti identitas, diplomasi budaya, dan resistensi kultural.
5. **Representasi data** dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan hubungan antara kuliner dan politik identitas Palestina.
6. **Interpretasi hasil** dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori gastrodipomasi, diplomasi budaya, dan kepentingan nasional.

Proses analisis ini bersifat induktif dan iteratif, di mana peneliti berperan aktif sebagai instrumen utama dalam menafsirkan data secara kontekstual.

3.5. Sumber Data

Data penelitian terdiri atas dua jenis:

1. **Data primer**, yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan diaspora Palestina.
2. **Data sekunder**, yang meliputi buku, artikel ilmiah, berita daring, laporan organisasi internasional, dan dokumen kebijakan UNESCO terkait perlindungan warisan budaya Palestina.

Gabungan kedua jenis data ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran gastrodipomasi sebagai strategi politik dan budaya dalam memperjuangkan identitas Palestina di tingkat global.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

4.1. Identitas Kuliner Palestina sebagai Warisan Budaya dan Simbol Nasional

Dalam masyarakat Palestina, makanan bukan sekadar sarana pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan sebuah artefak budaya yang menyimpan memori kolektif, sejarah kolonial, dan perjuangan eksistensial bangsa. Kuliner Palestina tumbuh dari peradaban Syam kuno yang subur dan kaya rempah, mengakar dalam relasi antara manusia, tanah, dan spiritualitas. Sejak masa Ottoman hingga kini, tradisi memasak menjadi bagian dari ekspresi kultural yang menghubungkan generasi di tengah kondisi penjajahan (Shomali, 2004).

Tiga hidangan paling ikonik — Hummus, Falafel, dan Kunafah — bukan hanya

representasi kuliner, melainkan simbol identitas nasional. Hummus, olahan kacang Arab (chickpeas) dan tahini, dianggap sebagai “makanan pengikat keluarga.” Ia melambangkan kesederhanaan hidup, persaudaraan, dan nilai kebersamaan yang melampaui sekat politik (Safa.ps, 2022). Falafel, bola goreng dari kacang Arab dan Fava, menggambarkan semangat komunitas dan kebersahajaan rakyat Palestina. Sedangkan Kunafah Nablus dengan keju lembutnya menandai kebanggaan lokal — simbol kemakmuran dan identitas kota Nablus (Arti, 2018).

Selain itu, terdapat hidangan lain seperti Maqluba, Musakhan, dan Tabbouleh yang kini menjadi bagian dari diplomasi kuliner modern Palestina. Maqluba (arti harfiah: “dibalik”) menjadi metafora tentang ketabahan — sebuah hidangan nasi dan ayam yang dibalik secara simbolis sebelum disajikan, mencerminkan filosofi “membalik keadaan” dari penderitaan menjadi kekuatan. Musakhan, ayam dengan bawang dan sumac di atas roti taboon, melambangkan kehangatan rumah dan keberlanjutan tradisi, sementara Tabbouleh menonjolkan kesegaran dan vitalitas budaya Mediterania. Semua hidangan ini tidak hanya diwariskan, tetapi juga “diperjuangkan” — menjadi bahasa politik melalui cita rasa.

Seperti yang ditegaskan oleh Laila El Haddad, jurnalis dan diaspora Palestina di Amerika Serikat:

“Makanan kami adalah cara kami mengingat, melawan, dan mencintai. Ketika dunia mengenal Hummus atau Falafel, kami ingin mereka tahu: rasa itu berasal dari tanah kami, dari tangan ibu-ibu kami, dari sejarah kami.” (wawancara pribadi, 2024)

Dalam konteks ini, kuliner menjadi mnemonic device — alat pengingat kolektif yang menegaskan bahwa Palestina bukan hanya tempat di peta, tetapi juga rasa yang hidup dalam memori dan tubuh rakyatnya.

4.2. Apropriasi Budaya dan Perebutan Narasi oleh Israel

Sejak berdirinya negara Israel tahun 1948, terjadi bentuk kolonialisme baru yang tidak hanya fisik, melainkan kultural. Israel menempuh strategi apropriasi budaya, dengan mengklaim warisan kuliner Palestina sebagai “makanan nasional Israel” dalam kampanye pariwisata dan promosi internasional (White, 2017). Hummus dan Falafel dipasarkan di Eropa dan Amerika dengan label “authentic Israeli food”, menghapus jejak asal-usulnya sebagai produk budaya Arab-Palestina (Rosenberg, 2019).

Pendekatan ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari strategi Hasbara Project — kampanye citra nasional Israel yang memanfaatkan budaya populer untuk memperkuat legitimasi politik (Shomali, 2002). Melalui makanan, Israel berupaya “menormalisasi” identitasnya di mata dunia, sekaligus menyingkirkan memori kolektif Palestina dari narasi global. Apropriasi ini menciptakan apa yang disebut sebagai cultural dislocation — pemisahan antara objek budaya dan komunitas asalnya (Hall, 1997).

Dampak dari klaim sepihak ini bersifat multidimensi. Secara ekonomi, perusahaan Israel memonopoli produksi dan ekspor makanan khas Palestina seperti Hummus dalam skala industri. Secara simbolik, ia mengikis legitimasi sejarah Palestina sebagai bangsa yang memiliki peradaban panjang. Namun, respon Palestina juga tumbuh melalui gerakan cultural resistance. Seperti disampaikan Emad Al Amad, diaspora Palestina dan pemilik restoran

Emados Shawarma di Jakarta:

“Ketika saya menyajikan Falafel di restoran, saya bukan sekadar menjual makanan. Saya ingin setiap pelanggan tahu, rasa ini adalah Palestina — sebuah bangsa yang masih hidup meski tanahnya dijajah.” (wawancara pribadi, 2024)

Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana identitas dapat menjadi bentuk perlawanan politis yang diwujudkan melalui praktik sehari-hari.

4.3. Gastrodiplomasi sebagai Instrumen Soft Power Palestina

Konsep soft power (Nye, 2004) menjelaskan bahwa daya tarik budaya dapat memengaruhi opini global lebih efektif dibandingkan kekuatan militer. Dalam konteks Palestina, gastrodiplomasi menjadi strategi alternatif untuk membangun empati internasional dan mengartikulasikan narasi kemanusiaan melalui bahasa universal: makanan.

Partisipasi Palestina dalam Expo Dubai 2020 adalah momentum penting. Paviliun Palestina menampilkan kuliner seperti Kunafah, Hummus, dan Musakhan, disertai narasi visual tentang sejarah dan kebudayaan. Dalam konteks diplomasi budaya, makanan di sini bukan hanya komoditas, melainkan representasi eksistensi (Ghani, 2021).

Dibandingkan dengan negara seperti Thailand, yang memanfaatkan gastrodiplomasi melalui program “Global Thai” untuk memperluas pengaruh ekonomi dan pariwisata (Rockower, 2012), atau Korea Selatan dengan “Hansik Globalization Project” untuk membangun citra modernitas dan kemajuan (Jang & Paik, 2012), Palestina menghadapi tantangan yang berbeda. Gastrodiplomasinya tidak lahir dari stabilitas politik atau promosi ekonomi, melainkan dari kebutuhan untuk bertahan dan melawan penghapusan identitas. Dengan kata lain, gastrodiplomasi Palestina adalah diplomasi resistif.

Berbeda pula dengan Jepang yang mempromosikan washoku melalui UNESCO untuk memperkuat citra estetika dan kesederhanaan, Palestina menggunakan kuliner untuk menegaskan hak eksistensi. Inilah yang membuatnya unik — makanan menjadi alat negosiasi eksistensial, bukan sekadar instrumen branding budaya.

4.4. Peran Diaspora dan Praktik Kuliner Transnasional

Diaspora Palestina berfungsi sebagai “diplomat kultural tanpa bendera.” Mereka memanfaatkan ruang diaspora untuk membangun kembali identitas kolektif dan menyampaikan narasi nasional melalui praktik kuliner. Di Jakarta, Emad Al Amad menjadikan restorannya sebagai ruang edukasi budaya. Ia menyajikan shawarma dan falafel sambil menjelaskan sejarah Palestina kepada pelanggan Indonesia.

“Makanan adalah bahasa yang paling lembut tetapi paling jujur,” katanya, “karena orang akan mengingat rasa lebih lama daripada pidato politik.” (wawancara pribadi, 2024)

Di Amerika Serikat, Laila El Haddad melakukan bentuk diplomasi budaya melalui media tulis. Buku *The Gaza Kitchen* (2013) bukan hanya kumpulan resep, tetapi juga catatan sosial tentang kehidupan di bawah blokade. Ia menulis: “Dapur Gaza adalah ruang perlawanan, tempat perempuan menjaga kehidupan tetap hangat di tengah kehancuran.” Pandangan ini menunjukkan dimensi gender dalam diplomasi kuliner — di mana perempuan

menjadi penjaga budaya dan narator sejarah melalui dapur (Abu-Lughod, 2013).

Kedua figur ini menunjukkan bahwa gastrodiploasi Palestina berjalan bottom-up, dijalankan oleh aktor non-negara yang menafsirkan kembali diplomasi melalui empati, rasa, dan kehangatan manusiawi.

4.5. Dukungan Internasional dan Peran Chef Non-Palestina

Menariknya, dukungan terhadap perjuangan kultural Palestina juga datang dari luar komunitasnya. Salah satu figur penting adalah Michelle Santoso, seorang chef Indonesia yang menggunakan platform digital untuk mempopulerkan kuliner Palestina. Melalui video dan unggahan edukatif di YouTube dan Instagram, Michelle mengajarkan cara membuat Hummus, Falafel, dan Maqluba sambil menceritakan konteks sosial dan sejarahnya.

Dalam salah satu unggahannya (2024), Michelle menulis:

“Ketika kita belajar memasak makanan Palestina, kita sebenarnya sedang belajar empati. Kita ikut menjaga cerita dan martabat di balik setiap rasa.”

Praktik Michelle memperlihatkan model solidaritas transnasional yang disebut oleh Featherstone (2002) sebagai global cultural flow — pergerakan simbol dan nilai budaya yang menembus batas negara. Chef seperti Michelle berperan sebagai transcultural intermediary, menjembatani narasi Palestina ke masyarakat global dengan pendekatan humanistik.

Hal ini memperkuat solidaritas Indonesia–Palestina yang berakar pada sejarah diplomatik anti-kolonial (Syuib, 2020). Dalam konteks diplomasi publik, peran Michelle menunjukkan bahwa soft power dapat bersumber dari individu, bukan hanya negara. Ini menegaskan bahwa diplomasi budaya kontemporer bersifat desentralistik dan partisipatif (Wilson, 2011).

4.6. Globalisasi, Media, dan Diplomasi Budaya Digital

Era digital telah mentransformasi cara Palestina mengartikulasikan identitasnya. Media sosial menjadi ruang perlawanan budaya yang baru. Melalui tagar seperti #TasteofPalestine, #PalestineCooks, dan #CookingforFreedom, diaspora dan pendukung global memperkenalkan kuliner Palestina sebagai simbol kemanusiaan dan hak untuk hidup.

Fenomena ini sejalan dengan gagasan participatory diplomacy (Manor, 2019), di mana publik berpartisipasi langsung dalam proses diplomasi melalui teknologi digital. Dalam konteks Palestina, konten kuliner bukan sekadar promosi makanan, melainkan narasi yang menggugah kesadaran global tentang kolonialisme dan ketahanan budaya.

Merujuk website This Week in Palestine, kampanye daring oleh komunitas diaspora di Eropa menggelar “Virtual Palestine Food Festival” pada 2021 berhasil menjangkau penonton dari berbagai negara. Festival ini menggabungkan kelas memasak, musik, dan diskusi politik, menampilkan dimensi baru diplomasi publik berbasis budaya dan partisipasi warga.

4.7. Gastrodiploasi dan Kepentingan Nasional Palestina

Dalam kerangka hubungan internasional, kepentingan nasional biasanya diartikan sebagai upaya mempertahankan eksistensi dan pengaruh negara (Morgenthau, 1948). Namun,

bagi Palestina yang belum sepenuhnya berdaulat, kepentingan nasional juga mencakup upaya mempertahankan cultural sovereignty. Gastrodiplomasi menjadi instrumen untuk menegaskan keberadaan bangsa melalui narasi positif di ruang internasional.

Melalui promosi kuliner, Palestina menggeser diskursus global: dari "wilayah konflik" menjadi "pusat peradaban kuliner Mediterania." Di sinilah kekuatan gastrodiplomasi — bukan hanya menciptakan citra, tetapi juga membentuk empati. Dengan cara ini, Palestina memanfaatkan budaya sebagai strategic narrative untuk meneguhkan legitimasi dan memperoleh solidaritas global.

4.8. Diskusi dan Implikasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa gastrodiplomasi Palestina memiliki karakter unik dibandingkan praktik di negara lain. Bila Thailand, Korea Selatan, atau Jepang menggunakan makanan untuk nation branding, Palestina menggunakannya untuk nation surviving. Gastrodiplomasi menjadi alat untuk menolak penghapusan budaya, memperkuat identitas, dan memperjuangkan pengakuan.

Dari perspektif Cultural Studies, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk everyday resistance (Scott, 1985) — perlawanan yang tidak bersenjata, namun bermakna politis. Melalui tindakan memasak, menulis, dan berbagi resep, masyarakat Palestina mengklaim kembali narasi mereka yang direbut oleh kolonialisme budaya.

Peran diaspora seperti Laila El Haddad dan Emad Al Amad menunjukkan kekuatan agency individu dalam diplomasi non-negara. Sementara keterlibatan tokoh non-Palestina seperti Michelle Santoso memperluas solidaritas lintas budaya, memperlihatkan bahwa empati kuliner dapat melampaui batas identitas nasional.

Dalam konteks teoritis, temuan ini memperkaya literatur soft power dengan dimensi etis dan humanistik. Gastrodiplomasi Palestina tidak hanya membangun citra, tetapi juga menyampaikan pesan moral tentang hak, keberanian, dan kemanusiaan. Dalam situasi penjajahan, makanan menjadi bahasa diplomasi yang paling damai sekaligus paling kuat.

5. KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa kuliner bukan hanya aspek kultural yang bersifat estetis, melainkan arena politik, diplomatik, dan identitas. Dalam konteks Palestina, makanan menjadi sarana utama untuk menegaskan eksistensi bangsa di tengah situasi penjajahan dan apropriasi budaya yang sistematis oleh Israel. Melalui praktik gastrodiplomasi, Palestina memanfaatkan cita rasa, tradisi, dan narasi kuliner untuk membangun empati internasional serta melawan penghapusan identitas budaya.

Temuan menunjukkan bahwa kuliner seperti Hummus, Falafel, Kunafah, Musakhan, Maqluba, dan Tabbouleh berfungsi sebagai simbol perlawanan kultural sekaligus instrumen komunikasi politik. Klaim sepihak Israel terhadap makanan-makanan tersebut bukan sekadar perebutan rasa, tetapi juga perebutan legitimasi sejarah. Dengan demikian, kuliner menjadi locus dari *cultural contestation* — pertempuran simbolik antara penjajahan dan ketahanan

budaya.

Palestina melalui pemerintah, diaspora, dan masyarakat sipil telah menggunakan kuliner sebagai soft power yang menonjolkan humanitas, sejarah, dan kearifan lokal. Paviliun Palestina di Expo Dubai 2020, restoran diaspora seperti milik Emad Al Amad di Jakarta, karya sastra kuliner seperti *The Gaza Kitchen* oleh Laila El Haddad, serta dukungan internasional dari tokoh non-Palestina seperti Michelle Santoso, semuanya memperlihatkan bahwa gastrodiplomasi tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga oleh aktor non-negara melalui pendekatan humanistik dan partisipatif.

Dengan membandingkan praktik Palestina dengan negara-negara seperti Thailand, Korea Selatan, dan Jepang, dapat disimpulkan bahwa meskipun tujuan gastrodiplomasi pada umumnya adalah promosi citra dan ekonomi, bagi Palestina ia berfungsi sebagai alat resistensi dan eksistensi. Gastrodiplomasi Palestina adalah diplomasi perjuangan — diplomasi yang “memasak kedaulatan” dalam setiap resep dan menyajikannya sebagai narasi kemanusiaan di meja global.

5.2. Refleksi Teoretis

Temuan penelitian ini memperluas pemahaman atas teori soft power (Nye, 2004) dengan menambahkan dimensi etis dan postkolonial. Dalam banyak studi, soft power sering dikaitkan dengan kemampuan negara kuat untuk memengaruhi melalui daya tarik budaya dan institusi. Namun, kasus Palestina memperlihatkan bahwa soft power juga bisa digunakan oleh entitas non-negara untuk mempertahankan eksistensinya di tengah keterbatasan politik. Dengan demikian, soft power tidak selalu bersifat hegemonik, tetapi juga dapat menjadi instrumen resistensi moral.

Selain itu, konsep cultural resistance (Scott, 1985) menjadi sangat relevan. Praktik memasak, membuka restoran, atau menulis buku resep di bawah kondisi penjajahan dapat dibaca sebagai bentuk everyday resistance. Dalam tindakan-tindakan sederhana tersebut terkandung pesan politik yang mendalam: mempertahankan identitas melalui kehidupan sehari-hari. Gastrodiplomasi Palestina adalah wujud konkret perlawanan non-kekerasan, di mana rasa menjadi bahasa solidaritas global.

Teori networked diplomacy (Hocking, 2005) dan participatory diplomacy (Manor, 2019) juga terkonfirmasi dalam penelitian ini. Diplomasi kontemporer tidak lagi monopoli negara, melainkan dijalankan oleh jaringan aktor transnasional yang saling terhubung melalui media digital dan solidaritas budaya. Diaspora, chef, penulis, influencer, bahkan masyarakat biasa dapat berperan sebagai diplomat kultural yang efektif. Fenomena kampanye digital seperti #TasteofPalestine menunjukkan bahwa diplomasi masa kini bersifat kolaboratif, lintas negara, dan berbasis empati.

Akhirnya, dari perspektif Cultural Studies, seperti yang dijelaskan oleh Hall (1997) dan Featherstone (2002), penelitian ini memperlihatkan bahwa budaya — termasuk makanan — adalah medan perjuangan atas makna. Apropriasi kuliner oleh Israel menunjukkan bagaimana hegemoni beroperasi melalui representasi. Namun, praktik gastrodiplomasi Palestina membuktikan bahwa makna dapat direbut kembali melalui strategi simbolik yang lembut tetapi kuat: memasak, berbagi, dan menceritakan asal-usulnya.

5.3. Saran

a. Bagi Diplomasi Palestina

Gastrodiplomasi sebaiknya diintegrasikan ke dalam strategi diplomasi publik Palestina secara lebih terencana. Pemerintah Palestina bersama organisasi budaya dapat membentuk Palestinian Culinary Institute atau program Palestine Food Heritage Initiative yang mendokumentasikan resep tradisional dan melatih duta kuliner. Upaya ini dapat memperkuat pengakuan internasional melalui warisan budaya tak benda yang diakui UNESCO.

Selain itu, kerja sama dengan diaspora dan negara sahabat seperti Indonesia, Turki, dan Malaysia perlu diperluas. Restoran diaspora dapat dijadikan kanal komunikasi publik yang mempromosikan sejarah dan kemanusiaan Palestina. Diplomasi kuliner dapat digabungkan dengan diplomasi pariwisata, seni, dan musik untuk menciptakan ekosistem diplomasi budaya yang berkelanjutan.

b. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini membuka ruang baru dalam studi diplomasi budaya. Gastrodiplomasi Palestina menawarkan paradigma “diplomasi dari bawah” (bottom-up diplomacy) yang menekankan peran individu dan komunitas, bukan semata institusi negara. Pendekatan ini dapat dijadikan model analisis untuk kasus lain — seperti Tibet, Kurdi, atau Rohingya — yang juga menggunakan budaya sebagai alat representasi politik.

Selain itu, studi ini memperkaya literatur soft power dengan dimensi moral dan humanistik. Makanan tidak hanya mencerminkan identitas nasional, tetapi juga menjadi alat komunikasi etis yang menghubungkan bangsa-bangsa melalui rasa dan cerita.

c. Bagi Masyarakat Global dan Praktisi Budaya

Gastrodiplomasi Palestina memperlihatkan bahwa solidaritas budaya bisa lahir dari tindakan sederhana seperti memasak atau berbagi resep. Inisiatif seperti yang dilakukan oleh Chef Michelle Santoso menunjukkan bagaimana empati lintas bangsa dapat diartikulasikan melalui kuliner. Dalam konteks global yang penuh ketegangan politik, makanan menawarkan jembatan universal yang melampaui batas agama, etnis, dan ideologi.

d. Bagi Kajian Hubungan Internasional

Penelitian ini menegaskan pentingnya memperluas studi HI ke arah pendekatan kultural. Diplomasi masa kini tidak hanya ditentukan oleh negosiasi formal, tetapi juga oleh simbol, narasi, dan praktik budaya sehari-hari. Dalam kasus Palestina untuk memperjuangkan identitas dan budayanya, gastrodiplomasi membuka ruang analisis baru tentang kekuasaan non-material dan komunikasi lintas budaya sebagai instrumen perjuangan eksistensi dalam mempertahankan sejarah dan budaya di dalam ruang penjajahan.

5.4. Penutup

Pada akhirnya, kuliner Palestina adalah metafora bagi perjuangan: sederhana namun bertahan, lembut namun bermakna. Dalam setiap sendok Hummus dan setiap potongan Kunafah, tersimpan sejarah, kesedihan, dan harapan. Melalui makanan, Palestina tidak hanya mengundang dunia untuk mencicipi rasa, tetapi juga untuk memahami perjuangan mereka.

Sebagaimana diungkapkan oleh Emad Al Amad dalam wawancara:

“Kami mungkin kehilangan tanah, tapi tidak rasa. Rasa itu tetap hidup di lidah siapa pun yang mau mengenalnya.”

Kalimat ini merangkum esensi gastrodipomasi Palestina: sebuah upaya mempertahankan eksistensi bangsa melalui rasa, cerita, dan cinta. Makanan menjadi bahasa diplomasi yang paling universal — menghubungkan manusia, menyentuh emosi, dan membangun solidaritas lintas batas. Dalam dunia yang terpecah oleh konflik, mungkin rasa adalah bentuk diplomasi yang paling damai dan paling jujur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Lughod, L. (2013). *Do Muslim Women Need Saving?* Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Arti, N. (2018). *Palestinian Sweet Heritage: The Story of Kunafah Nablus*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Crawford, J. (1976). *The Creation of States in International Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Davis, R. (2001). *Palestinian Heritage and Resistance: Cultural Identity in Exile*. *Journal of Middle Eastern Studies*, 33(4), 587–603.
- El Haddad, L. (2013). *The Gaza Kitchen: A Palestinian Culinary Journey*. Northampton, MA: Just World Books.
- Featherstone, M. (2002). *Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity*. London: Sage Publications.
- Ghani, R. (2021). *Pavilion Palestina di Dubai Expo 2020: Diplomasi Budaya di Tengah Penjajahan*.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage Publications.
- Hocking, B. (2005). Rethinking the “New” Public Diplomacy. In J. Melissen (Ed.), *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations* (pp. 28–43). London: Palgrave Macmillan.
- Jang, G., & Paik, W. (2012). *Korean Cuisine and the Politics of Globalization: Hansik as Culinary Diplomacy*. *Korea Observer*, 43(4), 595–623.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kurniawan, D. (2017). *Soft Diplomacy dan Solidaritas Global terhadap Palestina*. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(2), 145–156.
- Lange, M. (2013). *Historical Methods in the Social Sciences*. London: Sage Publications.
- Manor, I. (2019). *The Digitalization of Public Diplomacy*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Mark, S. (2010). *A Greater Role for Cultural Diplomacy*. *The Hague Journal of Diplomacy*, 5(3), 375–399.
- Morgenthau, H. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Knopf.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.
- Rockower, P. (2012). *Recipes for Gastrodipomacy. Place Branding and Public Diplomacy*, 8(3), 235–246.
- Rosenberg, Y. (2019). *Falafel and the Politics of Cultural Ownership*. *Middle East Review*, 45(2), 112–128.
- Safa.ps. (2022). *Traditional Palestinian Cuisine: Hummus and Beyond*.

- Santich, B. (2004). *The Study of Gastronomy and Its Relevance to Hospitality Education and Training*. *International Journal of Hospitality Management*, 23(1), 15–24.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Shomali, M. (2002). *Cultural Memory and Identity in Palestine*. Ramallah: Palestinian Heritage Center.
- Shomali, M. (2004). *Palestinian Cultural Heritage Under Occupation*. Ramallah: Palestinian Heritage Center.
- Steph, L. (n.d.). *Culinary Traditions of Palestine*. Palestinian Food Journal.
- Syaibani, A. (2012). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Syuib, M. (2020). *Perjanjian Internasional dan Kedaulatan Palestina dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jakarta: UI Press.
- Tanzeh, A. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Tariq, F. (2021). *Falafel and the Street Food Culture in Palestine*.
- Utami, D. (2018). *Makanan dan Identitas Budaya dalam Konteks Globalisasi*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(1), 23–34.
- UNESCO. (2003). *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. Paris: UNESCO.
- White, B. (2017). *Israeli Apartheid: A Beginner's Guide*. London: Pluto Press.
- Wilson, R. (2011). *Cultural Diplomacy: The Linchpin of Public Diplomacy*. Washington, DC: American Academy of Diplomacy.